

## SEJARAH PUSAT HIDROGRAFI DAN OSEANOGRAFI TNI ANGKATAN LAUT

Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) adalah Komando Utama Pembinaan TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kasal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2016 tentang perubahan Atas Perpres Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Pushidrosal bertugas menyelenggarakan pembinaan hidro-oseanografi (hidros), meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut dan keselamatan navigasi pelayaran, baik untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan umum, dan menyiapkan data dan informasi wilayah pertahanan di laut dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut.

Sesuai dengan tugas pokoknya, Pushidrosal berkewajiban menyiapkan, menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi untuk kepentingan TNI maupun untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan keselamatan navigasi pelayaran, Pushidrosal mempunyai kewenangan dan legalitas tunggal dalam bidang hidrografi dalam menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi berupa peta laut baik peta kertas maupun peta navigasi elektronik dan publikasi nautika.

Pushidrosal ditetapkan sebagai lembaga hidrografi nasional dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1951 tanggal 31 Maret 1951 (PP RI No. 23/1951) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 tahun 1960 tanggal 14 Juli 1960 (Keppres RI No. 164/1960), mengemban fungsi sebagai Lembaga Hidrografi Militer dan Lembaga Hidrografi Nasional Indonesia.

Sebagai pengemban fungsi hidrografi militer dan pertahanan, Pushidrosal bertanggung jawab untuk mampu menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi yang akurat dan mutakhir sebagai data dasar yang akan digunakan sebagai bahan analisa strategi pertahanan nasional. Sedangkan sebagai Lembaga Hidrografi Nasional Indonesia, Pushidrosal melaksanakan fungsinya sebagai penanggung jawab untuk memberikan jaminan keselamatan navigasi pelayaran di seluruh wilayah perairan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, Pushidrosal merupakan representasi legal dan wakil pemerintah RI dalam keanggotaan resmi organisasi internasional yaitu International Hydrographic Organization (IHO) yang berkedudukan di Monaco dan sekaligus sebagai anggota Komisi Hidrografi Asia Timur atau East Asia Hydrographic Commission (EAHC) dan North Indian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC). Selain itu menjadi anggota delegasi pemerintah RI di beberapa organisasi internasional di bidang Hidrografi, Oseanografi dan Navigasi pelayaran seperti International Maritime Organization (IMO), Inter-Government Oceanographic Commission (IOC), United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

Sejarah berdirinya Pushidrosal diawali dengan dibentuknya panitia perbaikan pemetaan laut di Netherland East Indies pada tahun 1821. Kemudian pada 1823 Angkatan Laut Belanda mendirikan

depo peta laut di Batavia yang berfungsi menyediakan peta laut dan buku nautika untuk kepentingan umum.

Seiring dengan perkembangan lalu lintas perdagangan saat itu, pada tahun 1848 Depo Peta Laut dikembangkan menjadi Bureau Hydrografie. Selanjutnya pada tahun 1850, dibentuk Geografische Dients (Dinas Geografi) di bawah Angkatan Laut Belanda. Pada tahun 1864 lembaga tersebut dilikuidasi menjadi bagian dari Departemen Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Batavia. Kemudian pada tanggal 9 Juli 1874, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk dan meresmikan Bureau Hydrografie yang merupakan bagian dari Departemen der Marine Kerajaan Belanda untuk mengantisipasi semakin ramainya lalu lintas kapal dagang antara Eropa ke Indonesia, serta semakin meningkatnya kebutuhan akan data hidrografi.

Pada tahun 1876 melalui Surat Keputusan Parlemen Belanda, kantor Hidrografi di Batavia dibuka kembali sebagai the East Branch, akan tetapi pembuatan peta laut tetap menjadi tugas kantor hidrografi di Den Haag. Dalam periode tahun 1885 hingga 1889, kantor Hidrografi Batavia kembali digabung dengan Kantor Hidrografi di Den Haag hingga masa perang dunia I dan II. Disamping kegiatan survei dan pemetaan hidrografi, Biro Hidrografi ikut serta dalam penelitian laut seperti Ekspedisi Challenger tahun 1854-1857 yang meliputi survei hidrografi dan oseanografi. Ekspedisi Sibolga pada tahun 1899 merupakan ekspedisi yang dianggap sebagai peletak dasar bagi pengetahuan tentang cekungan-cekungan dalam perairan Indonesia Timur dan menghasilkan penamaan laut-laut di Indonesia.

Terjadinya Perang Dunia I pada tahun 1914 menyebabkan terjadi kekurangan personel pada kapal-kapal survei dan pemetaan Angkatan Laut Belanda, sehingga pada waktu itu mulai ditugaskan perwira dari Gouvernement Marine (Jawatan Pelayaran). Pada tahun 1918, Gouvernement Marine membentuk organisasi pemetaan laut sendiri yang dapat membantu Angkatan Laut Belanda melaksanakan survei dan pemetaan dengan menggunakan kapalnya sendiri. Pada periode ini dilaksanakan Ekspedisi Snellius I pada tahun 1929-1930 yang merupakan ekspedisi paling terkenal dan dianggap sebagai suatu kemajuan dalam penelitian oseanografi fisika dan Ekspedisi Dana yang dilakukan pada tahun 1932 yang merupakan kelanjutan dari Ekspedisi Snellius I.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) kegiatan survei dan pemetaan laut di Indonesia tidak banyak dilakukan karena kesibukan Jepang dalam perang. Penelitian yang dilakukan hanya untuk kepentingan perang dan pertahanan militer Jepang di Indonesia. Penelitian laut yang dilaksanakan diantaranya di perairan Teluk Bone dan Kolaka di Sulawesi Selatan untuk kepentingan tambang nikel, di perairan Teluk kau (Halmahera), halong-Ambon, Selat Bangka dan Palembang yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut Jepang.

Pada periode awal kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1950) kedua organisasi hidrografi pada masa penjajahan Belanda keberadaannya tetap dipertahankan. Kegiatan surta laut di Indonesia dilaksanakan oleh Biro Hidrografi Belanda. Pada tanggal 18 Oktober 1951, Pushidrosal atas nama pemerintah Indonesia tercatat sebagai anggota International Hydrographic Organization (IHO) ke-64 yang berkedudukan di Monaco. Pada tahun 1951 juga dilaksanakan Ekspedisi Galathea sebagai kelanjutan dari Ekspedisi Snellius.

Pada tahun 1951 dibentuk dua pejabatan hidrografi yaitu bagian hidrografi yang merupakan bagian dari Jawatan Pelayaran Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan pembuatan dan perbaikan peta laut, pedoman-pedoman laut, buku-buku dan penerbitan hidrografi lain sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1951 tanggal 31 Maret 1951 tentang pejabatan-pejabatan hidrografi pelayaran sipil. Pada tahun 1954-1957 dilakukan penelitian-penelitian laut secara rutin dan penelitian oseanografi. Kekuatan armada hidrografi saat itu terdiri unsur-unsur; KM Burjamhal, KM Dewa Kembar, KM Parit-I dan KM Parit-II.

Berdasarkan pertimbangan strategis dan efisiensi, pemerintah pada tanggal 14 Juli 1960 mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 tahun 1960 tentang penggabungan pejabatan Hidrografi Jawatan Pelayaran Departemen Perhubungan Laut ke dalam Jawatan Hidrografi Angkatan Laut (Janhidral) untuk melaksanakan fungsi hidro-oseanografi di seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya guna memenuhi sumber daya manusia, pada tanggal 1 April 1963 didirikan Sekolah Hidrografi dengan program pendidikan selama tiga tahun. Disamping itu, juga diadakan pengiriman personel untuk belajar di ITB, dan di luar negeri seperti; Amerika Serikat, Yugoslavia, Australia, Jepang dan Rusia.

Pada tahun 1962 terjadi perubahan struktural organisasi dari Jawatan ke Direktorat, sehingga Janhidral berubah menjadi Direktorat Hidrografi Angkatan Laut (Dithidral), yang juga diikuti dengan penambahan kapal-kapal survei yaitu RI Aries dari Rusia, RI Mayang tahun 1962 dan RI Jalanidhi dari Jepang tahun 1963.

Sesuai dengan perkembangan organisasi TNI AL secara menyeluruh dan perkembangan iptek kelautan khususnya, pada tanggal 23 Juli 1971 berdasarkan Skep Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan bersenjata (Skep Menhankam/Pangab) Nomor : Kep/A/39/VII/1971 Dithidral diubah menjadi Dinas Hidrografi TNI Angkatan Laut (Dishidral). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/11/VI/1976 tanggal 5 April 1976 Dishidral diubah namanya menjadi Jawatan Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Janhidros). Berdasarkan Keputusan Pangab RI Nomor : Kep/09/P/III/84 tanggal 31 Maret 1984 Janhidros diubah menjadi Dinas Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Dishidros). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor: 7/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang perubahan kembali Dishidros menjadi Jawatan Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Janhidros) dan kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Perkasal/42/VIII/2008 tanggal 2 Juli 2008 Janhidros diubah kembali namanya menjadi Dishidros sampai saat ini.

Guna memenuhi tuntutan tugas dan seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menjadikan sektor maritim sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, kontribusi sektor hidro-oseanografi yang dilaksanakan oleh Dishidros TNI AL dituntut untuk semakin ditingkatkan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2016 tentang perubahan Atas Perpres Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, dilaksanakan validasi organisasi Dishidros menjadi Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), yang pengukuhanannya dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. pada hari ini, Selasa

tanggal 13 September 2016 dengan upacara militer bertempat di Dishidros, Jalan Pantai Kuta V/1 Ancol Timur Jakarta Utara.

Sejak berdirinya hingga saat ini, Pushidrosal telah dipimpin sebanyak 22 perwira tinggi TNI AL. Laksamana Pertama TNI Drs. Wardiman tercatat sebagai pemimpin Dishidros pertama saat masih bernama Kajahidral yang menjabat dari tahun 1960 sampai dengan 1968. Saat ini Pushidrosal dipimpin oleh Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro.